

BAB II

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI DAN KEKUATAN MILITER SWEDIA DARI 1991-2017

Swedia muncul sebagai salah satu kekuatan besar Eropa pada akhir abad ke 17, dengan memiliki teritori serta pengaruh yang luas di kawasan Eropa pada masa itu. Dengan beraliansi dengan Perancis pada perang Napoleon untuk mendapatkan kembali teritori yang hilang pada konflik sebelumnya, Swedia melakukan kampanye militer terhadap Norwegia pada 1814. Semenjak saat itu, Swedia tidak ikut serta terhadap berbagai macam konflik, dan secara resmi menyatakan sebagai negara netral hingga melewati konflik besar pada jaman modern seperti Perang Dunia pertama dan Perang Dunia ke dua.¹

Melewati konflik besar Eropa seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yang membuat negara negara tetangga Swedia menjadi korban invansi dan pendudukan oleh negara kuat lain. Swedia melalui kebijakan netralnya, melakukan adaptasi terhadap situasi tersebut, dengan melakukan penerapan yang kuat terhadap pertahanan serta keamanan wilayah serta meminimalisir keinginan untuk melakukan kerjasama militer terhadap negara lain.

¹ Sweden celebrates 200 years of peace dalam <https://www.thelocal.se/20140815/sweden-celebrates-200-years-of-peace> dikases pada 08 Agustus 2018

Paska berakhirnya Perang Dunia ke Dua dan munculnya Persyarikatan Bangsa Bangsa, kebijakan netral Swedia tetap bertahan, hingga melewati Perang Dingin. Pada masa tersebut Swedia, ikut serta terhadap penerapan kebijakan kolektif yaitu “*Nordic Balance*” dengan negara negara nordik lain yang bertujuan untuk mempertahankan kedamaian kawasan diantara dua kekuatan besar dunia yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Dengan demikian Swedia mampu mempertahankan netralitas dan tetap aktif pada kancah politik internasional.²

Swedia mempertahankan prinsip “*alliansfriheit i fred syftande till neutralitet i krieg*” yang berarti bahwa tidak memihak pada masa damai dan tetap netral pada masa perang, walaupun demikian Swedia tetap menerapkan secara kuat serta melakukan pengembangan terhadap prinsip pertahanan wilayah dengan membangun kekuatan militer melalui wajib militer, pengembangan industri pertahanan dan bahkan memiliki ambisi untuk mengembangkan bom nuklir sebagai langkah pertahanan diri, walaupun ide ini ditinggalkan pada akhir 1960.³

Paska berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991, dan berubahnya pola konsep keamanan global. Membuat Swedia melakukan berbagai pembaharuan mengenai kebijakan politik luar negeri dan juga perubahan mengenai konsep pertahanan negara, yaitu:

² Pedrotty, D. J. (2016) *Prospect for Finland and Sweden to Pursue Closer Defence Cooperation with NATO*. Monterey: Naval Postgraduate School, 20.

³ *Ibid* hal.40

A. Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia Paska Perang Dingin Dari 1991-2017

Saat perang dingin berakhir, persepsi terhadap ancaman bukan lagi mengenai konflik militer antar negara, tetapi lebih kepada ketidakstabilan suatu negara yang mengakibatkan munculnya konflik didalam negara itu. Selain itu muncul isu baru antar negara seperti pencemaran lingkungan, organisasi kriminal dan terorisme yang membuat agenda politik internasional tidak lagi mengutamakan isu militer antar negara seperti pada saat perang dingin berlangsung.

Swedia menerapkan konsep ini, karena selepas runtuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin, membuat Swedia tidak memiliki peran khusus lagi sebagai negara netral yang berperan sebagai mediator maupun menjadi jembatan antara blok barat dan blok timur untuk melakukan dialog tertentu. Ketika pemerintahan nonsosialis mulai berkuasa di Swedia pada 1991, melalui Perdana Menteri Swedia pada saat itu, Carl Bildt mengatakan bahwa Swedia tidak lagi menerapkan kebijakan netralitas secara menyeluruh. Dan pada 1992, kebijakan netral Swedia berubah menjadi lebih terbatas mengenai konsep ketidak berpihakan secara militer, dengan memperkecil kebijakan militer dan tak berpihak pada masa masa damai, untuk menjaga agar Swedia memungkinkan tetap netral pada masa perang.⁴

Walaupun demikian, menurut Carl Bildt, Swedia tidak akan pasif jika negara negara Baltik maupun anggota Uni Eropa diserang. Pejabat penting kementerian luar negeri Swedia pada saat itu, Sverker Åström, mengungkapkan bahwa basis dalam hubungan antara Swedia dan Uni Eropa adalah untuk bekerja sama menyelesaikan krisis internal maupun ancaman eksternal,

⁴ K. Lidqvist (2016) *Cool Neighbours: How has Sweden's attitude towards Russia changed since the end of the Cold War*. Trollhattan: University of West, 22.

untuk saling membantu dalam hal menyelesaikan krisis yang terjadi.⁵

1. Menjalin Hubungan Dengan Russia

Hubungan dengan Russia, terjalin erat ketika presiden Gorbachev berkuasa, Swedia terkejut ketika Russia menunjukkan keinginannya untuk bertransisi menjadi negara demokrasi. Swedia menyambut baik keinginan Russia ketika Russia melakukan reformasi politik dan ekonomi. Menurut *Riksdag*, Russia tidak lagi terbebani oleh komunisme dan imperialism sehingga membuat hubungan antara Swedia dan Russia menuju kondisi yang baik. Swedia juga memberikan bantuan secara ekonomi terhadap Russia maupun negara negara bekas anggota Uni Soviet.⁶

Pada 1993, deklarasi kerjasama di tanda tangani antara Perdana Menteri Carl Bildt dan Presiden Russia Boris Yeltsin, yang berisi mengenai kerjasama dan ikatan hubungan erat termasuk dalam hal politik dan ekonomi melalui perdagangan antar Negara. Perdana Menteri Carl Bildt, menegaskan bahwa melalui perjanjian kerjasama antar kedua Negara, diharapkan mampu menjadi pondasi untuk menuju ikatan lebih erat dalam hubungan antar Negara dengan negara demokrasi baru, Russia.⁷

Dengan membantu Russia dan Negara negara bekas anggota Uni Soviet menjadi Negara yang demokratis, diharapkan mampu mengurangi ancaman keamanan bagi Eropa dan khususnya bagi Swedia itu sendiri. Hal ini mengakibatkan kebijakan keamanan Swedia berubah dari awalnya mengenai keamanan dan pertahanan nasional, menjadi kebijakan yang

⁵*Ibid* hal. 24

⁶*Ibid* hal. 25

⁷ *Ibid* hal. 26

lebih damai dan dalam hal pengurangan senjata dikawasan Eropa.

2. Menjadi Anggota Uni Eropa

Swedia menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 1995. Walaupun demikian Swedia tetap mempertahankan netralitas dimana pertahanan militer hanya dikembangkan dan di terapkan terhadap dalam menjaga kedamaian dan dalam operasi kemanusiaan saja. Swedia mendapatkan peningkatan dalam aspek politik, ekonomi dan keamanan. Melalui *Common Foreign and Security Policy* (CFSP), prioritas Swedia adalah untuk meningkatkan pengaruh kebijakan keamanan dan pertahanan didalam kawasan Eropa, yang dianut dan diprioritaskan oleh negara netral lain setelah bergabung dengan Uni Eropa. Dengan intergrasinya Swedia kedalam Uni Eropa, secara otomatis membuat Swedia memiliki hubungan yang dekat dengan NATO melalui program *Partnership for Peace* (PfP), walaupun secara resmi Swedia berada diluar aliansi tersebut, sejalur dengan kebijakan mengenai ketidak berpihakan serta netralitas Swedia didalam dunia internasional.⁸

Swedia mulai secara aktif ikut dalam kerjasama keamanan internasional dengan Amerika Serikat dan NATO, dan secara terbuka melakukan kerjasama keamanan dengan Uni Eropa sejauh tidak menyangkut pautkan dengan keamanan pertahanan wilayah antar negara. Partisipasi Swedia dalam hal keamanan seperti ikut dalam pasukan penjaga perdamaian (*United Nations Protection Force*) UNPROFOR di Bosnia pada 1993, ikut dalam NATO *Partnership for Peace* pada 1994, sebagai anggota observasi didalam *West European Union* (WEU) pada 1995, berpartisipasi dalam pasukan multinasional dibawah komando NATO dalam *Implementation Force* (IFOR)

⁸ TEPE, F. 2007, İSVEÇ NÖTRALİTESİ VE TERKİ, Swedish Neutrality and it's Abandonment, Vol.6, No. 2, *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s*, hal. 193. 2007

pada 1995, yang berganti menjadi *Stabilisation Force* (SFOR) untuk mengawasi perjanjian damai di Bosnia pada 1997, menjadi salah satu anggota dalam *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) dan bergabung dengan *West European Armaments Group* (WEAG) pada 1997, untuk bertujuan bekerja sama dalam melakukan penelitian di bidang pertahanan dan menciptakan pasar bahan baku pertahanan di kawasan Eropa.⁹

Melalui keanggotaannya di Uni Eropa dan kemitraan erat dengan NATO, Swedia terus memainkan peran kunci dalam pengembangan identitas keamanan Eropa dengan menghindari terlibat dalam pertahanan kolektif NATO dan juga aktif melalui pendekatan internasional melalui langkah tindakan manajemen krisis sipil dan pencegahan konflik. Pendekatan ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Swedia untuk terus aktif dalam operasi militer Uni Eropa di wilayah konflik di seluruh dunia, dan tetap bisa mempertahankan ke netralan Swedia.

3. Perang Chechnya

Perang Chechnya dimulai ketika wilayah di daerah pegunungan kaukasus utara ingin memisahkan diri Russia selepas runtuhnya Uni Soviet. Dengan banyaknya kriminalitas membuat Moscow mengirim militer ke daerah tersebut untuk menstabilkan situasi. Walaupun demikian, hal ini malah menjadikan konflik menjadi lebih parah, dengan lebih dari 80.000 orang terbunuh, dan mayoritas adalah masyarakat sipil, hal ini membuat dunia melakukan protes besar terhadap Russia, termasuk Swedia. Walaupun pada 1996, terjadi gencatan senjata, dan peperangan berhenti untuk sementara. Chechnya

⁹ Parker, Joshua. (2017) *The Neutral Ally: Sweden and the Social Construction of Security Identity*, Ottawa: University of Ottawa, 44

masih menjadi wilayah yang tidak stabil dengan masih banyaknya serangan terror dan geng kriminal merajarela.¹⁰

Swedia melakukan berbagai protes mengenai apa yang dilakukan Russia di Chechnya dimana telah melanggar hak asasi disana. Walaupun melakukan protes besar, tetapi juga Swedia masih melihat sisi positif yang ada dari Russia, dimana *Riksdag* menganggap bahwa Russia masih berusaha meninggalkan kebiasaan lama dalam komunisme dan imperialism menuju negara yang demokrasi, tetapi Swedia masih mengkhawatirkan bahwa apa yang terjadi di Chechnya, membuat Russia masih mengikuti cara totaliter yang dilakukan pada jaman Uni Soviet.¹¹

4. Krisis Kosovo

Kebijakan netral menjadikan dilemma bagi Swedia, terlebih ketika terjadinya konflik Kosovo pada 1998, ketika terjadinya perang sipil dan konflik yang melibatkan perang etnis tertentu yang mengakibatkan geonosida bagi etnis minoritas, yang tentunya menjadikan krisis kemanusiaan di akhir abad ke 20. Swedia adalah salah satu dari sedikit negara dimana memiliki landasan kuat mengenai konsep penerapan hak asasi manusia bagi masyarakat internasional, melalui menteri luar negeri Swedia pada saat itu, Anna Lindh, mengatakan bahwa prinsip dasar Uni Eropa, yang memiliki kesamaan dengan Swedia adalah mengenai demokrasi dan hak asasi manusia.¹²

¹⁰ First Chechnya War - 1994-1996. (2016, Maret 1), dalam
Globalsecurity.org:
<https://www.globalsecurity.org/military/world/war/chechnya1.htm>
diakses pada July 25, 2018

¹¹ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 29

¹² Basset, B. (2012), *Factors Influencing Sweden's Changing Stance on Neutrality*, Urbana: University of Illinois, 36

Pada 1999, NATO melakukan intervensi terhadap konflik Kosovo, meskipun Dewan Keamanan PBB belum mengeluarkan mandat untuk melakukan intervensi terhadap konflik Kosovo. Berdasarkan kebijakan resmi Swedia, satu satunya cara yang dapat di setuju mengenai penggunaan kekuatan militer internasional adalah sebagai langkah pertahanan diri ataupun dilakukan melalui mandat Dewan Keamanan PBB.¹³

Tanpa mandat dari PBB, Swedia tidak bisa melakukan aksi ataupun bantuan melalui militer untuk masyarakat Kosovo dan Albania ketika mereka dibantai oleh Serbia. Meskipun melalui pengaruh dari Dewan Keamanan dan menjadi anggota dari PFP, Swedia terkendala dari kebijakan netralitas Swedia sendiri. Pada Mei 1999, menteri Luar Negeri Swedia, Anna Lindh, mengatakan bahwa Swedia menyesali dengan apa yang terjadi di konflik Kosovo serta ketidakmampuan serta ketidakaktifannya masyarakat internasional untuk menyokong mandat dari Dewan Keamanan PBB, yang menghasilkan pembersihan etnis dan geonosida.¹⁴

Konflik Kosovo pada 1999, membuat Swedia melakukan refleksi ulang mengenai penerapan kebijakan netral didalam dunia internasional dan untuk menghadapi ancaman global yang baru. Pengalaman penerapan kebijakan netral Swedia di Kosovo memperlihatkan adanya sisi negatif dari penerapan kebijakan netral di dalam politik global.

5. Hubungan antara Swedia dan Russia ketika Vladimir Putin Pertama kali Berkuasa

Pada tahun 2000, ketika Vladimir Putin menjadi Presiden Russia, hubungan dengan negara negara Uni Eropa dan Swedia meningkat karena kebijakan politik luar negeri

¹³ Parker, Joshua, *Op.cit*, hal. 44

¹⁴ Basset, B, *Op.cit*, hal. 37

yang pro terhadap negara-negara Uni Eropa, hal ini diakibatkan karena sebelumnya keadaan ekonomi dan politik Rusia masih belum stabil. Swedia dan Uni Eropa menerapkan kebijakan untuk menguatkan hubungan antar negara dengan Rusia, sebagai agenda utama pada dekade selanjutnya. Rusia sangat disambut oleh negara-negara barat pada saat itu, karena keinginannya untuk berpartisipasi terhadap berbagai organisasi antar negara seperti memiliki ambisi untuk bergabung dengan *World Trade Organisation (WTO)*, Swedia ikut membantu dalam hal ini, dengan menunjukkan bantuan melalui pengembangan politik dan ekonomi.¹⁵

6. Mengevaluasi Kebijakan Luar Negeri Swedia 1991-2001

Berbagai diskusi politik internal Swedia mulai bermunculan mengenai bagaimana caranya dalam konsep moral penerapan terhadap tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan campur tangan militer bahkan dalam ketiadaan mandat Dewan Keamanan PBB, dari kasus konflik Kosovo pada 1999 sebagai langkah kedepannya bagi Swedia. Hal ini membuat berubahnya pandangan Swedia dalam penerapan netralitas dan merubah peran bagaimana caranya terlibat dalam tanggung jawab untuk melindungi dari krisis kemanusiaan di masa yang akan datang.¹⁶

Pada Februari 2001, belajar dari pengalaman terhadap konflik Kosovo, membuat Swedia mulai menyoroti peran penting PBB, serta membuka diskusi ataupun debat didalam parlemen mengenai kebijakan keamanan Swedia, namun dalam meninggalkan konsep penerapan kebijakan tidak berpartisipasi dalam aliansi militer bukan tujuan utama pada saat itu. Menteri Luar Negeri Swedia, Anna Lindh, mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Swedia terdiri dari tiga identitas, yaitu Nordik,

¹⁵ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 31

¹⁶ Basset, B, *Op.cit*, hal. 38

Eropa dan Dunia, menambahkan juga bahwa kebijakan tidak berpartisipasi dalam aliansi militer adalah asset bagi Swedia dan didukung dengan kuat oleh masyarakatnya, hal ini membuat Swedia bebas dalam melakukan tindakan, sehingga dapat mengurangi resiko konflik dan ketegangan di kawasan Eropa, dengan demikian membuat Swedia bisa menjadi lebih aktif kedalam pelucutan senjata nuklir, semua faktor diatas merupakan basis dari kebijakan keamanan Swedia.¹⁷

Selain itu penerapan penguatan hubungan dengan Russia, dimana bantuan Swedia terhadap Russia meliputi bantuan politik dan Ekonomi sangat gencar dilakukan sebagai langkah upaya untuk membuat Russia menjadi salah satu negara demokrasi yang baru dan mengurangi ancaman di kawasan Eropa seperti pada saat jaman perang dingin berlangsung.

7. Serangan Teroris 11 September 2001

Pada September 2001, persepsi dunia terhadap ancaman internasional tidak lagi datang dari negara maupun grup lokal yang terikat terhadap perselisihan mengenai akan suatu wilayah, tetapi datang dari sel teroris yang dianggap lebih berbahaya terhadap masyarakat internasional, terlebih selepas serangan pada 11 September 2001.

Aktor nonnegara menjadi salah satu ancaman utama setelah peristiwa 11 September, ketika teroris melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 5, dalam perjanjian NATO, dimana serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan terhadap semua negara anggota. Hal ini membuat seluruh anggota NATO melakukan operasi penumpasan sel teroris di Afghanistan.

Dibawah mandat dan pengawasan Dewan Keamanan PBB, Swedia menerjunkan militer tempurnya ke Afghanistan

¹⁷ Basset, B, *Op.cit*, hal. 39

pada akhir 2001, sebagai langkah upaya untuk mendukung pasukan *International Security Assistance Force* (ISAF) dan pemerintah Afghanistan, untuk membantu dalam hal menumpas terorisme melalui misi diluar pertempuran seperti membantu dalam hal intelejen tempur, melakukan kooperasi militer dengan sipil, dan juga pembangunan bagi provinsi di wilayah operasi militer tempur. Hal ini membuat Swedia memiliki kemauan untuk memperluas pengaruh asset militer diluar wilayah Eropa.¹⁸

Melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Swedia, mengenai kebijakan luar negerinya pada Februari 2002, Anna Lindh mengungkapkan bahwa secara resmi, Swedia menegaskan semua bentuk serangan teroris harus ditumpas, melalui kerjasama dengan Uni Eropa maupun internasional.¹⁹

Komitmen Swedia untuk menumpas terorisme menggambarkan berubahnya kebijakan luar negeri mengenai keamanan dan pertahanan yang sebelumnya adalah tidak berpartisipasi dalam aliansi militer manapun. Meskipun Swedia mengatakan bahwa netralitas merupakan tujuan utamanya terhadap setiap konflik di lingkup internasional, tetapi para pembuat kebijakan Swedia mulai menyadari bahwa keamanan Swedia lebih terjamin dengan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Swedia, Anna Lindh, mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keamanan dan kedamaian Swedia, adalah dengan cara bekerja sama dan bertindak secara bersama sama dengan negara negara lain. Lindh, juga menegaskan bahwa sebagai anggota di Uni Eropa, yang berdasarkan solidaritas, Swedia bersama sama dengan negara anggota Uni

¹⁸ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) dalam https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm diakses pada 08 Agustus 2018

¹⁹ Basset, Bergen, *Op.cit*, hal. 40

Eropa lain wajib bekerjasama dalam upaya menghindari terjadinya konflik di benua Eropa.²⁰

8. Kebijakan Luar Negeri Swedia Paska Serangan 11 September 2001

Semenjak 2003, konsep netralitas Swedia, tidak lagi seperti ketika awal perang dingin dimana ketidakberpihakan merupakan tujuan utama, berbagai kerjasama internasional telah banyak dilakukan oleh Swedia, walaupun demikian, Swedia masih secara resmi adalah negara netral. Ketika terjadinya pemilihan umum pada 2006, dan Frederic Reinfeldt menduduki posisi sebagai Perdana Menteri dan Carl Bildt dimana dulunya adalah Perdana Menteri Swedia periode 1991-1994, menduduki posisi menjadi menteri luar negeri, konsep netralitas Swedia perlahan berubah. Carl Bildt menyatakan bahwa kebijakan netral Swedia tetap pada ikatan netralitas pada masa lalu, tetapi menyarankan bahwa Swedia kedepannya harus lebih menempatkan kebijakannya lebih kedalam integrasi dengan Uni Eropa dan tidak lagi memusatkan netralitas sebagai prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Swedia.

9. Perang Georgia

Perang Georgia dimulai pada 2008 yang disebabkan oleh separatis yang menginginkan kemerdekaan untuk wilayah Ossetia selatan dan Abkhaz. Perang dimulai pada 8 Agustus 2008, dan berlangsung selama 5 hari, antara unit militer Georgia dan Ossetia selatan serta Abkhaz. Seperti yang terjadi di Chechnya dimana pasukan separatis mendapatkan bantuan dari militer Russia. Perang ini mendapatkan kritik dari internasional dimana setelah 5 hari pertempuran, dengan banyak korban jiwa. Setelah 5 hari pertempuran, gencatan senjata dilakukan dengan di wakili oleh Presiden Russia Dmitry Medvedev, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili dan Presiden Perancis Nicolas

²⁰ Basset, Bergen, *Op.cit*, hal. 41

Sarkozy. Presiden Nicolas Sarkozy sebagai representasi dari Uni Eropa didalam negoisasi ini. Walaupun di kritik oleh internasional, perang Georgia adalah jalan bagi Russia untuk menunjukkan sebagai kekuatan besar terhadap dunia. Meskipun demikian apa yang dilakukan oleh Russia membuat hubungannya dengan Swedia yang mengedepankan hak asasi manusia menjadi menurun dibanding pada tahun tahun sebelumnya. Menurut Riksdag bahwa apa yang dilakukan oleh Russia adalah ambisi politik semata untuk menguasai negara negara tetangganya.²¹

10. Menurunnya Hubungan antara Russia dan Swedia

Apa yang dilakukan oleh Moscow pada perang Chechnya dan Georgia menjadi perhatian utama bagi negara negara yang memegang prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, kritik banyak ditujukan terhadap Russia termasuk dari Swedia. Menurut Swedia, bahwa Russia masih kesulitan menyadari bahwa negara negara kecil mantan anggota Uni Soviet bukan lagi dikuasainya, dan menganggap bahwa Russia berhak melakukan apapun yang diinginkan terhadap negara negara tersebut, termasuk ketika negara negara kecil tersebut menginginkan untuk merapat terhadap Uni Eropa ataupun NATO, maka Russia berhak melakukan intervensi.

Melalui Riksdag, pentingnya melakukan hubungan antar negara dengan Russia terhadap kondisi apapun harus tetap dijalankan, meskipun apa yang dilakukan oleh Russia telah banyak melanggar prinsip kemanusiaan, Swedia menganggap bahwa Russia masih berusaha untuk bertransisi menjadi negara yang lebih demokratis dibanding sebelumnya, selain itu juga Swedia tetap akan melakukan kritik terhadap Russia bila masih melakukan pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia, tetapi juga akan tetap melanjutkan hubungan dan kerjasama dengan Russia, karena Russia termasuk negara tetangga penting bagi

²¹ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 33

Swedia. Berbagai konflik yang melibatkan Russia, Uni Eropa masih belum bisa bersatu dalam cara menanganinya. Menurut Riksdag, cara Russia menangani konflik jauh dari kata konstruktif, karena hal ini membuat Swedia perlu memiliki peran penting dalam menjaga keamanan Eropa dan Dunia. Maka dari itu Swedia meningkatkan dan mengeratkan hubungan dengan NATO, *Partnership of Peace* yang dibuat NATO untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan keamanan diantaranya dan negara negara di kawasan Eropa.²²

11. Melakukan Peningkatan Pertahanan Kolektif Regional

Pada 2008, Swedia memimpin *Nordic Battle Group* pertama kalinya, melalui grup tempur ini yang merupakan bagian dari Uni Eropa *battlegroups* yang terdiri dari Finlandia, Norwegia, Estonia, dan Irlandia sebagai contributor utama Carl Bildt menegaskan bahwa akan mengupayakan kerjasama lebih erat dengan NATO sebagai langkah tujuan untuk membawa bersama sama kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanannya.

Pada 2009, Swedia memiliki kesempatan untuk mengirimkan delegasinya ke dalam parlemen Uni Eropa, dengan tujuan untuk membuat Uni Eropa menjadi salah satu kekuatan dunia, Swedia juga menggunakan pengaruhnya untuk membuat Uni Eropa lebih bersatu dalam menghadapi ancaman dari manapun.²³

Hal ini ditegaskan kembali oleh Carl Bildt pada 2010, bahwa keanggotaan Swedia didalam Uni Eropa berarti bahwa Swedia termasuk dalam aliansi politik Uni Eropa, dengan demikian saling bekerjasama dan bersolidaritas antara masing masing anggota demi keamanan Eropa merupakan salah satu

²² K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 35

²³ TEPE, F., *Op.cit*, hal. 32

prinsip utama Swedia. Dan juga Swedia tidak akan tinggal diam jika anggota Uni Eropa ataupun negara negara nordik terkena bencana ataupun diserang oleh ancaman lain. Swedia juga mengharapkan negara negara lain juga berlaku sama bilamana Swedia mendapatkan kesulitan.²⁴

Ketika pemilihan umum 2010, dimana Menteri Luar Negeri dijabat kembali oleh Carl Bildt, pemerintahan Swedia tetap pada komitmen terhadap kebijakan luar negeri sebelumnya, dimana menjalin hubungan dengan Uni Eropa merupakan garis terdepan terhadap segala kebijakan luar negeri Swedia. Pada 2011, melalui statmen Carl Bildt, Swedia kembali menegaskan bahwa pentingnya mempererat solidaritas antar negara anggota Uni Eropa terhadap segala bentuk bencana maupun ancaman yang datang dari pihak manapun, konsep ini serupa dengan pasal 5 dalam perjanjian NATO.²⁵

Memasnya sikap yang dilakukan oleh Russia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya terhadap negara negara tetangga ataupun bekas anggota Uni Soviet, berdampak terhadap Uni Eropa serta Swedia karena menganggap bahwa keamanan Eropa juga terancam dari sikap Russia. Menurut Riksdag, terhadap sikap Russia bahwa Swedia tidak hanya memperjuangkan kebebasan dari masyarakat yang tertindas kebebasannya oleh sikap Russia dan menganggap bahwa hal itu terkait dengan keamanan nasional Swedia sendiri.

Swedia juga bekerjasama dengan Norwegia, Denmark, dan Finlandia dalam NORDEFECO (NORdic DEFence COoperation) yang digagas oleh semua negara anggota dan berdiri pada 2009. Pada 2013, angkatan bersenjata Swedia telah ikut serta lebih dari 130 proyek diberbagai area meliputi latihan, pertukaran informasi, dan pengembangan kapabilitas manajemen krisis. Latihan militer bersama merupakan salah

²⁴ Basset, Bergen, *Op.cit*, hal. 48

²⁵ Basset, Bergen, *Op.cit*, hal. 50

satu focus utama dari kerjasama militer regional ini, meliputi latihan militer yang hampir dilaksanakan setiap minggu di pangkalan udara militer di kota Rovaniemi Finlandia, Luleå Swedia dan Bodø Norwegia.²⁶

12. Perang Sipil Suriah

Pada awal 2011, terjadi banyak demonstrasi anti pemerintah yang menghasilkan protes besar dan pemberontakan diseluruh Timur Tengah, tidak terkecuali Suriah, dimana protes ini menghasilkan perang saudara, antara pendukung pemerintah, pemberontak serta pihak yang ingin mendirikan negara sendiri seperti *Islamic States*.

Russia memosisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam menghadapi terorisme dan extremismisme dalam perang sipil Suriah. Keterlibatannya dalam perang sipil ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kapabilitas militer mereka telah meningkat drastis dan bahwa mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan *interest* mereka.

Dalam konflik ini, Swedia melalui *Riksdag* menegaskan bahwa dalam kondisi perang sipil Suriah, permasalahan bukan hanya dalam pemerintahan Assad, tetapi juga karena faktor eksternal yaitu Russia dan China dimana kedua negara tersebut menggunakan hak veto untuk melindungi pemerintahan Assad terhadap intervensi PBB, maka dari itu Swedia harus melakukan aksi dan menerapkan penekananan terhadap kedua negara tersebut agar menyetujui adanya intervensi dari PBB.

Swedia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Russia adalah melanggar hak asasi manusia dimana mendukung situasi konflik semakin memanjang. Situasi pun juga semakin memburuk, dimana tidak hanya Russia yang

²⁶ Kunz, Barbara. (2015), *Sweden's NATO Workaround: Swedish defence policy against the backdrop of Russian revisionism*, Focus strategique no 64, 28

mendukung salah satu pihak dalam konflik ini, tetapi juga Amerika Serikat dimana AS melakukan dukungan terhadap pemerintahan oposisi. Jika Swedia memberikan tekanan terhadap Russia atas dukungan terhadap pemerintahan rezim, maka Swedia juga harus melakukan tekanan terhadap Amerika Serikat juga mendukung pemerintahan oposisi, sehingga membuat situasi konflik ini semakin memanas.

13. Hubungan Swedia dengan Russia ketika berkuasanya kembali Vladimir Putin

Terpilihnya kembali Vladimir Putin sebagai presiden Russia pada 2012 menggantikan Dmitry Medvedev. Kebijakan politik luar negeri Medvedev lebih liberal dan lebih mengutamakan kebijakan domestic dibanding Putin, yang kembali berkuasa dengan lebih mengutamakan kebijakan politik luar negerinya yang lebih keras. Bisa dilihat dari dukungan penuh Russia terhadap rezim Suriah dan juga meningkatnya kritik terhadap Uni Eropa dan PBB dalam menangani situasi di dalam konflik Suriah dan konflik Libya.

Ketika pemilihan berlangsung di Russia, Swedia telah banyak mengkritik terhadap pemilihan tersebut dimana menurutnya pemilihan umum Russia, penuh dengan korupsi dan tidak adanya kebebasan pers. Bersamaan dengan terpilihnya Putin, Riksdag mulai membawa isu tentang keamanan Swedia terhadap Russia, walaupun tidak didiskusikan secara serius sejak perang dingin. Berbagai bukti bermunculan menunjukkan bahwa Russia telah kembali menjadi tidak demokratis dan lebih otoriter didalam pemerintahan Putin membuat Riksdag, lebih waspada terhadap Russia. Melalui pernyataan Riksdag, setelah lebih dari 200 tahun tidak terlibat perang dengan Russia, termasuk dalam Perang Dunia pertama dan kedua, Swedia harus siap jika kalau Russia menjadi ancaman nyata bagi Swedia. Pandangan positif terhadap Russia mulai memudar setelah keterlibatannya terhadap berbagai konflik, satu satunya pandangan positif terhadap Russia yang

masih bertahan adalah mengenai perdagangan dan hubungan ekonomi antara Swedia dengan Russia, karena faktor ikatan kuat hubungan ekonomi kedua negara ketika Russia bergabung dengan WTO.²⁷

14. Krisis Ukraina

Russia melakukan aneksasi terhadap Krimea yang merupakan wilayah di Ukraina pada 18 Maret 2014, menurut pandangan dari masyarakat internasional bahwa apa yang dilakukan oleh Russia merupakan tindakan ilegal, tetapi menurut Russia, apa yang dilakukannya adalah sekedar hanya untuk melindungi etnis minoritas Russia dan mengambil alih apa yang seharusnya menjadi hak Russia. Pendudukan yang dilakukan oleh Russia terlihat sebagai tindakan yang benar.

Ukraina sendiri pada dasarnya memiliki niat untuk bergabung dengan Uni Eropa serta NATO daripada dengan Russia. Ketika Presiden Victor Yanukovich berkuasa yang merupakan Presiden pro Russia, mulai berpaling dari Uni Eropa dan mendekati Russia, yang menghasilkan protes besar besaran yang membuat Yanukovich melarikan diri dari Ukraina. Diwaktu yang bersamaan, minoritas Russia di Krimea menginginkan kemerdekaannya sehingga Russia mengirim pasukan khusus untuk membantu milisi local Krimea untuk menguasai gedung gedung pemerintahan di Krimea. Riksdag percaya bahwa situasi di Krimea sangatlah gawat dan hampir seperti ketika perang Georgia, dan mengancam tindakan Russia. Riksdag menyatakan bahwa apa yang dilakukan Russia sangat tidak bisa di setujui yang akan memberikan dampak konsukuensi terhadap pertahanan dan keamanan tidak hanya di Eropa tetapi juga di Swedia. Untuk menunjukkan dukungan terhadap Ukraina, Uni Eropa, PBB dan Swedia berkontribusi dalam menjalankan bantuan ekonomi dan bantuan politik, selain itu juga memberikan sanksi berat terhadap Russia atas

²⁷ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 40

tindakan yang dilakukannya melalui embargo senjata, larangan impor, ekspor dan investasi menuju Krimea.²⁸

15. Menjadi lebih aktif dalam kerjasama pertahanan internasional

Pengembangan dalam *Partnership of Peace* dimana Swedia telah menjadi anggota semenjak 1996, ketika terjadinya *Alliance's Wales 2014 Summit*, Swedia menandatangani *Status of Forces Agreement*, didalam kesepakatan ini yang dibuat atas inisiatif Amerika Serikat mengakibatkan Swedia dapat terus bekerjasama dengan NATO meliputi pertukaran intelejen dan partisipasi dalam latihan persiapan dan latihan kesiapan militer tempur. Pada 2015, Swedia ikut serta dalam beberapa latihan militer utama NATO seperti *Artic Challenge Exercise and Baltops*, dan juga dalam Trident Juncture 2015, latihan militer NATO terbesar semenjak 2002.²⁹

Pada *Wales Summit* Swedia menandatangani juga *Memorandum of Understanding* untuk *Host Nation Support Agreement*. Yang berisi bahwa perjanjian ini akan berlaku sebagai basis rencana untuk operasi yang akan datang, meliputi latihan pada saat masa damai, manajemen krisis dan operasi militer saat keadaan perang di Swedia maupun di negara tetangganya. Walaupun demikian persetujuan ini memiliki batasan dimana NATO harus mendapatkan persetujuan secara formal dari Stockholm untuk beroperasi di wilayah Swedia.³⁰

16. Memanasnya hubungan antara Swedia dan Russia

²⁸ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 42

²⁹ Kunz, Barbara, *Op.cit*, hal. 29

³⁰ Kunz, Barbara, *Op.cit*, hal. 27

Agresi Russia terhadap negara tetangga semakin tahun semakin membuat yakin bahwa keamanan negara tetangga Russia termasuk Swedia mulai terancam. Berbagai pertanyaan muncul bagi masyarakat Swedia tentang akankah Swedia bergabung dengan NATO, sehingga bila Russia memulai konflik maka NATO akan membantu. Pada 2016, Menteri Luar Negeri Russia, Sergey Lavrov mengatakan bahwa terkait dengan Swedia, bila Swedia bergabung dengan NATO, maka Russia akan mengambil tindakan yang perlu dilakukan.

Akibat dari hal ini, dan juga memanasnya situasi konflik Ukraina, membuat Riksdag mengambil tiga observasi secara strategis yaitu: Russia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara tetangga, kedua dari keputusan yang diambil oleh Russia, menjadikan ketidakpastian masa depan Russia dan sikapnya agresif terhadap berbagai negara lain, dan ketiga, dampak dari krisis Ukraina menunjukkan bahwa perlunya kerjasama lebih kuat didalam Uni Eropa untuk menangkal ancaman dari luar serta untuk menyelesaikan krisis yang akan terjadi. Pada maret 2016, Riksdag mengeluarkan pernyataan atas kondisi di Ukraina, dengan mengatakan bahwa bersama sama dengan negara negara lain untuk terus menekan Russia atas tindakan yang melanggar kebebasan dan hak asasi manusia, bersama sama dengan negara seperti Norwegia, Islandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan negara lain harus bersama sama berkomitmen untuk menjaga prinsip kunci hukum internasional dan keamanan Eropa. Membiarkan Russia melakukan tindakan seenaknya akan membuat ketidakstabilan akan keamanan internasional.³¹

B. Kekuatan Militer Swedia dari Tahun 1991-2017

Paska runtuhnya Uni Soviet, ancaman dari Eropa Timur tidak lagi sebesar pada tahun tahun sebelumnya. negara negara di Eropa Barat, NATO dan Amerika Serikat mulai

³¹ K. Lidqvist, *Op.cit*, hal. 41

perlahan melucuti segala jenis persenjataannya dikawasan Eropa, dan melakukan alih fungsi pasukan tempurnya sebagai pasukan penjaga perdamaian.

Pada mulanya konsep pertahanan Swedia adalah *totalförsvaret* yang berarti konsep pertahanan total dimana melibatkan militer dan masyarakat sipil yang bertanggung jawab atas keamanan Swedia. Organisasi militer, kontingen masyarakat sipil Swedia (*Myndigheten för samhällsskydd och beredskap*), Lembaga Penelitian Pertahanan Swedia, Administrasi Material Pertahanan Swedia (*Försvarets materielverk*), Universitas Pertahanan Nasional Swedia, juga serta pelayanan masyarakat seperti Polisi dan lembaga medis ikut serta dalam konsep pertahanan ini. Pasukan militer nasional Swedia juga terdiri dari pasukan pertahanan nasional (*Hemvärnet*) yang terdiri dari pasukan wajib militer dan para sukarelawan, walaupun wajib militer telah ditangguhkan pada 2010, sejak 1995 semua masyarakat Swedia yang berumur dari 16-70 tahun wajib melayani negara dalam *totalförsvaret*.³²

Pedoman secara umum dari pertahanan Swedia ditentukan oleh parlemen Swedia (*Riksdag*), berdasarkan proposal dari pemerintah yang akan menentukan bagaimana pendanaan pertahanan nasional untuk pengembangan dari 10-15 tahun mendatang. Walaupun demikian pendanaan ini diadopsi setiap empat tahun sekali (1996-2000-2004-2009 dan 2015-2020), yang juga berdasarkan dari laporan dan penelitian lebih lanjut dari semua lembaga yang terlibat dalam konsep pertahanan total yang akan menentukan bagaimana kebijakan pertahanan Swedia akan diterapkan.

Anggaran pertahanan Swedia pada 1996 mulai berubah ketika Swedia meninggalkan pertahanan anti invansi dan beralih ke pasukan militer ekspedisi. Walaupun demikian masih

³² totalförsvarsplikt dalam <https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/varnplikt/totalforsvarsplikt/> diakses pada 10 Agustus 2018

ada pasukan wajib militer Swedia, dan masalahnya adalah terlalu banyak pasukan wajib militer, masalah ini dapat dikurangi dengan mengurangi persiapan tempur. Selanjutnya pada anggaran pertahanan tahun 2000, situasi keamanan mulai berubah dimana menurut analisis dari departemen pertahanan Swedia bahwa ancaman invasi tidak realistis dalam jangka waktu 10 tahun kedepan.³³ Meskipun demikian Swedia mulai menguatkan pasukan territorial untuk menangani adanya krisis kecil dan manajemen krisis yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dengan adanya hal ini maka muncul masalah baru bagi Swedia yaitu meningkatnya mobilisasi bagi pasukan pertahanan yang hampir mencapai 12 bulan.³⁴

Dengan anggaran pertahan 2004, paradigma mulai berubah dimana reformasi kebijakan pertahanan Swedia mulai menjadi *ominriktning* atau orientasi dan mulai dilanjutkan kembali dengan menggarisbawahi tentang penekanan angkatan militer bersenjata untuk menjadi pasukan ekspedisi *Stabilisation Force* (SFOR) seperti di Bosnia dan Herzegonia sebagai acuan pengiriman pasukan ekspedisi. Pertahanan territorial dihilangkan sebagai penunjang dalam pengiriman pasukan ekspedisi. Wajib militer masih dipertahankan tetapi pasukan rekrutmen pasukan professional masih dipertahankan, sejauh bagaimana bila munculnya suatu ancaman maka Riksdag dan pemerintah Swedia memiliki wewenang untuk mengambil pilihan dengan meningkatkan pasukan militer Swedia untuk

³³ Europas säkerhet – Sveriges Försvar, report Ds, 1999:55 dalam <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/1999/09/ds-199955/> diakses pada 9 Agustus 2018

³⁴ *Ibid* hal.61

memiliki kapabilitas merespon operasi militer skala besar yang mengancam kedamaian Swedia.³⁵

Anggaran pertahanan ini mengakibatkan berkurangnya pendanaan unit militer dalam distrik militer tertentu selain itu juga rencana dalam pertahanan Swedia tidak lagi diterapkan. Operasi pertahanan territorial tidak lagi menjadi suatu hal yang utama dalam kebijakan militer. Salah satu hasilnya adalah pengurangan personel militer di Gotland dan hanya terdapat 14 tank di gudang penyimpanan disana.

Pada anggaran militer 2008, sempat tertunda atas munculnya perang Georgia, Swedia dan negara negara barat pertama harus membuat analisa akan terjadinya perang tersebut serta membuat analisa atas kemungkinan bahwa Russia akan menjadi ancaman bagi negara negara tetangga. Anggaran militer baru dapat diterapkan pada 2009, dengan mengedepankan "*Deployable Defense*", yaitu keputusan di menit terakhir dalam merespon terjadinya perang. Mulanya adalah dengan mematikan unit militer tertentu demi mengaktifkan pertahanan territorial kembali secara mendadak tanpa perubahan struktur organisasi militer yang ada. Dengan anggaran pertahanan ini, semua pasukan militer Swedia diharuskan untuk siap dalam melakukan operasi manajemen krisis dan pertahanan territorial Swedia sampai tahun 2019. Pasukan militer tersebut akan siap untuk diterjunkan dalam jangka waktu satu minggu sejauh bagaimana pasukan militer tersebut dapat menjalankan misi operasi militer. Dengan ini maka sekitar 4 misi dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan terdiri dari 2000 personil militer aktif yang akan menjalani tugas diluar wilayah Swedia ataupun sebagai pertahanan nasional, dengan *Nordic Battle Group*. Terlepas dari ancaman baru yang muncul, perlengkapan militer dikurangi, seperti pertahanan udara, tank berat dan pesawat tempur

³⁵ Försvar för en ny tid, report, 2004:30 dalam <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2004/06/ds-200430/>. diakses pada 9 Agustus 2018

dikurangi secara drastis. Dengan anggaran pertahanan ini, Swedia mulai meninggalkan konsep wajib militer.³⁶

Anggaran pertahanan terbaru yang diterapkan Swedia adalah pada Juni 2015, yang disiapkan untuk menghadapi tekanan dan ancaman berdasarkan konflik Ukraina, yang merupakan negara tetangga Swedia. Kebijakan pertahanan Swedia berfokus pada Laut Baltik dan peningkatan kapabilitas pasukan militer untuk melancarkan serangan balik terhadap serangan dari negara asing dikawasan teritori Swedia. Inti dari anggaran pertahanan ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan Selain itu adanya tambahan 10.2 milyar SEK dalam jangka waktu 5 tahun. Yang dapat dilihat dari table 2.1 dibawah:

Tabel 1.1

Rencana anggaran pertahanan Swedia pada tahun 2015, dalam juta SEK (Swedish Krona)³⁷

	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Rencana Awal	42,031	43,087	43,881	46,026	47,576	222,601
Penambahan	1,324	1,900	2,200	2,320	2,500	10,244
Total	43,355	44,987	44,081	48,346	50,076	232,845

³⁶ Turbulens försenar förvarsproposition dalam <https://www.svd.se/turbulens-forsenar-forsvarsproposition> diakses pada 9 Agustus 2018

³⁷ Försvarpolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, prop. 2014/15:109, dalam <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/forsvarspolitisk-inriktning-2016-2020/>. Diakses pada 9 Agustus 2018

Penambahan anggaran pertahanan dilakukan untuk menambah maupun memperbaiki berbagai asset militer seperti penambahan perangkat tempur individual, penempatan pasukan militer di Gotland, melakukan peningkatan kapal jenis *corvette* dan penambahan kapabilitas pertahanan udara.³⁸

Pasukan pertahanan Swedia termasuk dengan masyarakat sipil pada 2015, berjumlah sekitar 20,000 personil militer permanen, 21,200 personil pertahanan wilayah, 5,200 personel sipil, 9,900 personil militer kontrak dan 550 personel kategori lain.³⁹

Kapabilitas pertahanan Swedia di tujukan untuk bertahan terhadap serangan bersenjata dengan meningkatkan kalkulasi terhadap serangan dari musuh yang potensial. Perintah tempur bagi seluruh angkatan bersenjata Swedia adalah untuk siap siaga bagi pasukan militer permanen di kawasan Swedia maupun diluar kawasan Swedia, juga dengan pasukan territorial yang terdiri dari pasukan militer kontrak dan pasukan wajib militer untuk pertahanan nasional, yang termasuk dalam undang undang pertahanan total atau *Total Defence Service Act*.⁴⁰

³⁸ *Ibid* hal.10

³⁹ Swedish armed forces, Försvarsmakten i siffror: Personalsiffror dalam <https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/> diakses 9 Agustus 2018

⁴⁰Swedish Ministry of Defence, inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020, regeringsbeslut 7, fö2015/00953/MFI dalam <https://www.regeringen.se/contentassets/3ece8-de58479a48889d32355229921/regeringsblut-inriktning-for-forsvarsmaktens-verksamhet-2016-2020.pdf> Diakses pada 9 Agustus 2018

Berdasarkan rencana pertahanan tahun 2016-2020, pasukan angkatan darat Swedia terdiri dari 2 brigade yang mampu bertempur dalam konflik berkepanjangan melawan pasukan musuh yang terlatih. Selain itu juga pasukan darat akan ditambah dengan 1 battalion pasukan *motorized*, 2 brigade pengintai, dan Mekanis Grup Tempur Gotland. Battalion infantry ringan akan di organisir ulang agar dapat dintransportasikan lewat jalan udara. Pasukan darat akan diutamakan untuk terdiri dari personil militer cadangan dibawah undang undang wajib militer Swedia. Agar pasukan militer tetap siaga dikala damai, maka 2 battalion mekanis dan 1 batalion infantry *motorized* akan banyak terdiri dari pasukan militer professional. Jumlah total dari pasukan darat Swedia akan terdiri dari dua brigade tempur *headquarters*, dua brigade pengintai, lima battalion mekanis, dua battalion *motorized*, satu battalion infantri ringan, satu battalion grup tempur mekanis Gotland, dua battalion artileri, dua battalion pertahanan udara, satu battalion ISR, satu battalion keamanan, satu battalion polisi militer, satu battalion penjaga pantai, satu kompani CBRN, satu kompani transport berat, dan 40 batalion pasukan pertahanan nasional.⁴¹

Sedangkan pada inti angkatan laut Swedia, akan terdiri dari tujuh *corvettes*, empat kapal selam dan kendaraan pembersih ranjau. Pada pasukan angkatan laut Swedia sepenuhnya akan terdiri dari dua *Surface Warfare Flotilla Staffs*, dua skuadron *Corvettes*, dua skuadron pembersih ranjau, dua skuadron penunjang, satu skuadron penyelam pembersih

⁴¹ Sweden's Defence Policy 2016 to 2020 dalam https://www.government.se/globalassets/government/dokument/forsvardepartementet/sweden_defence_policy_2016_to_2020. Diakses pada 10 Agustus 2018.

ranjau, satu skuadron kapal selam, satu battalioan amfibi, satu kompani kapal patrol dan satu markas angkatan laut.⁴²

Pada angkatan udara Swedia, akan terdiri dari 4 skuadron *Air Wings Fighters* dengan pesawat JAS 39C/D, satu skuadron angkut udara, satu *Air Combat Control* dan satu battalioan pengintai udara serta satu battalioan *Helicopter Wing*.⁴³

Dan terakhir, adalah *Joint Force* yang terdiri dari satu pasukan bersenjata *Headquarters*, empat *Regional Headquarters*, satu battalioan komunikasi, satu battalioan *Electronic Warfare*, satu *Armed Forces Logistics* (FMLOG), satu battalioan logistic, satu battalioan teknis, satu kompani *Movement Control*, dua kompani medis, dua kompani bantuan medis dan satu *Special Operations Group* dan 19 unit depot.⁴⁴

Realitasnya sendiri berkata lain, keputusan yang diambil dalam penerapan kebijakan pertahanan 2016-2020, bahkan menambah masalah baru. Kebijakan pertahanan sebelumnya secara structural kurang dalam hal pendanaan, dengan anggaran 2016-2020, akan sangat menolong untuk menanggulangi krisis ini. Krisis structural dalam angkatan bersenjata Swedia bahkan menjadi salah satu dari perhatian publik, dalam suatu acara documenter televisi Swedia, berjudul “*Vad hände med försvaret?*” atau berarti “apa yang terjadi dengan angkatan bersenjata?” menunjukkan saat itu Swedia memiliki 120 tank Leopard 2A5 tetapi hanya memiliki 42 personil untuk mengoprasikannya. Pertahanan udara nasional dipusatkan di Boden dimana berjarak sejauh sekitar 1000km

⁴² *Ibid*, hal.9-10

⁴³ *Ibid*, hal.11

⁴⁴ *Ibid* hal.12

dari tempat strategis Swedia yaitu Stockholm atau Gothenburg dan bahkan lebih jauh ke pulau Gotland.⁴⁵

Masalah tidak hanya terdapat di angkatan darat, tetapi juga di matra angkatan bersenjata Swedia lainnya seperti angkatan laut, helicopter pemburu kapal selam Swedia yang dibutuhkan sudah di bongkar untuk memenuhi suku cadang lain, material yang dibutuhkan untuk merawat helicopter tersebut telah tertunda datang selama kurang lebih 10 tahun. Selain itu angkatan laut mempunyai lima kapal jenis *corvette* dan tidak sanggup untuk memberi persenjataan pertahanan udara ke kapal kapal tersebut. Satu satunya kapal selam mini Swedia, *HMS Spiggen* yang merupakan asset penting untuk latihan militer dalam scenario penyusupan Russia, telah di jual pada 2011. Di sisi angkatan udara, muncul masalah dimana suatu negara yang menginginkan untuk membeli pesawat tempur *Gripen* akan meminjam pesawat tempur Swedia untuk sementara selagi pesanan pesawat tersebut akan di selesaikan. Komandan tertinggi angkatan bersenjata Swedia, Micael Byden, yang sebelumnya merupakan kepala staff angkatan udara, menyatakan bahwa akan dengan tegas menghentikan praktek tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Kunz, Barbara, *Op.cit*, hal.25

⁴⁶ Kunz, Barbara, *Op.cit*, hal.26